

RENCANA AKSI KEGIATAN

SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN

TAHUN 2015 - 2019



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
Board for Development and Empowerment Human Resources of Health

Jakarta, 2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat Nya maka dapat diselesaikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 sesuai dengan Rencana Aksi Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I.1/004873/2017.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra) periode lima tahun sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya Renstra Kementerian/Lembaga dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat eselon II. Rencana Aksi Program dan Rencana Aksi Kegiatan tersebut merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini agar dijadikan acuan bagi penanggungjawab/pelaksana kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan dan semua Pemangku Kepentingan yang terkait.

Jakarta, 27 September 2017

Sekretaris



dr. Kirana Pritasari, MQUIH
NIP. 196404081990032001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.04/I.1/ 005062 /2017

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 dan perubahan Rencana Aksi Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I.1/004873/2017, perlu dilakukan perubahan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.04/I.1/ 005062 /2017

TENTANG

RENCANA AKSI KEGIATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 dan perubahan Rencana Aksi Program PPSDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.03/I.1/004873/2017, perlu dilakukan perubahan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan, Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101);
8. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005 - 2025;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/Menkes/SK/II/2010 tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019

KESATU : Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120

Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508

Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



- KEDUA : Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan bagi Penanggung Jawab/Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemangku Kepentingan terkait.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Nomor HK.02.03/1.1/002832/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015 - 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 September 2017

Sekretaris,



dr. Kirana Pritasari, MQIH
NIP. 196404081990032001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
SK RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Kegunaan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	1
1. Tujuan	1
2. Kegunaan	2
C. Tugas dan Fungsi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	2
D. Tata Urut	3
BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Kondisi Umum, Potensi dan Tantangan	5
B. Lingkungan Strategis.....	8
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI PELAKSANAAN	
A. Visi.....	10
B. Misi.....	10
C. Tujuan.....	11
D. Arah Kebijakan	11
E. Sasaran Strategis.....	12
F. Strategi Pelaksanaan	14

**BAB IV KEGIATAN PELAKSANAAN DAN TARGET KINERJA, KERANGKA
PENDANAAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

A. Kegiatan Pelaksanaan dan Target Kinerja	15
B. Kerangka Pendanaan	19
C. Kerangka Regulasi	20
D. Kerangka Kelembagaan	21

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan	22
B. Evaluasi	22

BAB V PENUTUP.....24

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Matriks Kinerja Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

LAMPIRAN 2 : Matriks Alokasi Anggaran Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM
Kesehatan

DAFTAR PUSTAKA v

KONTRIBUTOR vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019, Salah satu program pembangunan kesehatan dalam Renstra tersebut adalah Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan, yang menjadi tanggung jawab Badan PPSDM Kesehatan.

Untuk memperlancar pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan, telah pula disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2015-2019, yang berisikan Visi, Misi, Strategi, kegiatan dan kebijakan pelaksanaan kesehatan sampai dengan Tahun 2019.

Sekretariat Badan PPSDMK sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan adalah penanggung-jawab dan pelaksana dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Agar semua bagian/unit di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, maka perlu disusun Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Rencana Kegiatan Lima Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini berisikan arah dan kebijakan pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan serta indikator kinerja dan kebutuhan pembiayaan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015 – 2019.

B. TUJUAN DAN KEGUNAAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN

1. TUJUAN

Sebagai acuan bagi seluruh penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan menggerakkan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya.

2. KEGUNAAN

Menjamin agar seluruh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang dilakukan oleh penanggung jawab/pelaksana kegiatan di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dapat berkembang secara dinamis dan bersinergi, serta saling melengkapi dan saling mendukung.

C. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN

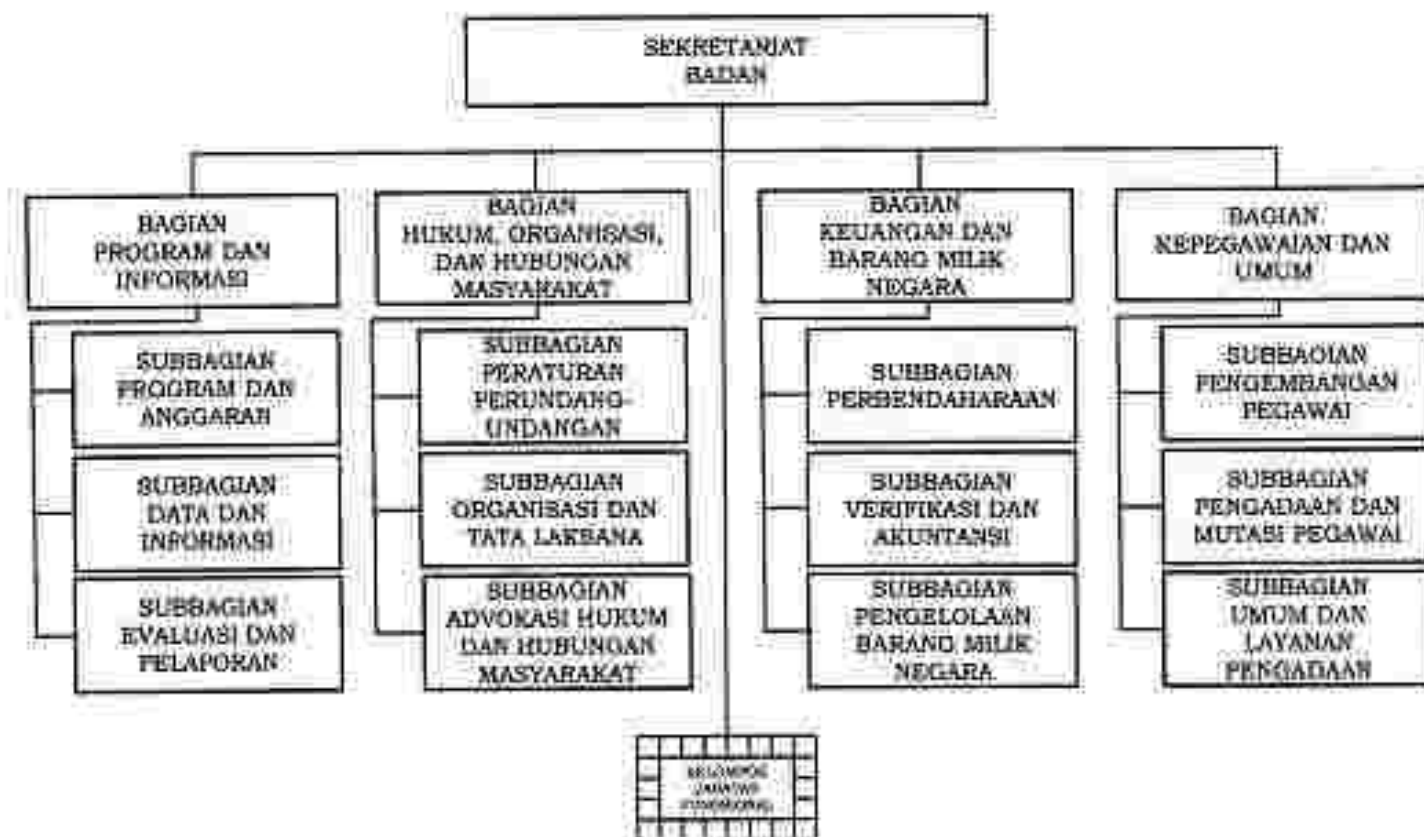
Sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi;
- b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdiri atas :

1. Bagian Program dan Informasi;
2. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan
4. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan



D. TATA URUT

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SK RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

B TUJUAN DAN KEGUNAAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN

C TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN

D TATA URUT

BAB II GAMBARAN UMUM

A KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN

B LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB III VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI
PELAKSANAAN

- A VISI
- B MISI
- C ARAH KEBIJAKAN
- D SASARAN STRATEGIS
- E STRATEGI PELAKSANAAN

BAB IV KEGIATAN PELAKSANAAN DAN TARGET KINERJA,
KERANGKA PENDANAAN, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

- A KEGIATAN PELAKSANAAN DAN TARGET KINERJA
- B KERANGKA PENDANAAN
- C KERANGKA REGULASI
- D KERANGKA KELEMBAGAAN

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- A PEMANTAUAN
- B EVALUASI

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MATRIKS TARGET KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019

LAMPIRAN 2 : MATRIKS KERANGKA PENDANAAN RENCANA AKSI
KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN TAHUN 2015 – 2019

DAFTAR PUSTAKA

KONTRIBUTOR

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN

1. KONDISI UMUM

Sumber Daya manusia (SDM) adalah modal utama dalam pembangunan nasional dan perlu terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi. Daya saing SDM yang tinggi ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kesetaraan Gender (IKG) yang dicapai melalui pengendalian penduduk, peningkatan taraf pendidikan, dan peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.

Tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan upaya promotif dan preventif; meningkatkan pelayanan kesehatan ibu anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Disamping itu pembangunan kesehatan juga dihadapkan pada upaya untuk menurunkan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Secara khusus tantangan utama dalam lima tahun ke depan adalah dalam meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, penyiapan provider (*supply side*) dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.

Penetapan pengembangan SDM kesehatan sebagai salah satu prioritas adalah karena Indonesia masih menghadapi masalah tenaga kesehatan baik jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya. Indonesia dengan kondisi geografis kepulauan perlu dikembangkan analisis kebutuhan tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, serta pembagian waktu kerja dan bukan lagi berdasarkan jumlah penduduk. Kebutuhan SDM Kesehatan mengacu pada standar ketenagakesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya dibandingkan dengan data keadaan SDM kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan sub rumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan

lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisan medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Total SDM Kesehatan Tahun 2016 sebanyak 1.000.780 orang yang terdiri dari 736.077 orang tenaga kesehatan (73,6 %) dan 264.703 orang tenaga penunjang kesehatan (26,4 %). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebanyak 29,66 % dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan tradisional 0,05 % dari total tenaga kesehatan..

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Untuk mendukung fungsi dan tujuan Puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan. Pada peraturan yang sama di Pasal 16 Ayat 3 disebutkan bahwa minimal tenaga kesehatan di Puskesmas terdiri dari dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian. Sedangkan tenaga penunjang kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lainnya.

Total SDM Kesehatan Puskesmas di Indonesia tahun 2016 adalah 341.536 orang yang terdiri dari 289.465 orang tenaga kesehatan (84,75 %) dan 52.071 orang penunjang kesehatan (15,25 %). Proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas terbanyak adalah bidan sebanyak 120,091 orang (35,2 %) sedangkan proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas yang paling sedikit yaitu ahli teknologi laboratorium sebesar sebanyak 6.481 orang (1,9 %). Sedangkan Total SDM Kesehatan di Rumah Sakit pada tahun 2016 adalah 586.522 orang yang terdiri dari 406.558 orang tenaga kesehatan (69,3%) dan 179.964 orang tenaga penunjang kesehatan (30,78 %). Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu perawat 33,3 % sedangkan proporsi tenaga kesehatan paling sedikit yaitu tenaga kesehatan tradisional (0,008 %).

Total dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 48.651 orang yang terdiri dari 21.041 orang dokter spesialis dasar (43,25%), 8.201 orang dokter spesialis penunjang (16,86%), 18.363 orang dokter spesialis lain (37,74%), dan 1.046 orang dokter gigi spesialis (2,15%). Menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis anak dengan jumlah 6.161 orang (12,66%).

Untuk meningkatkan ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 Puskesmas.
- b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
- c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910 orang.

Empat dokter spesialis dasar yang dimaksud yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam, dan dokter bedah, sedangkan tiga dokter spesialis penunjang yaitu dokter spesialis radiologi, dokter spesialis anestesi, dan dokter spesialis patologi klinik.

2. POTENSI DAN TANTANGAN

Permasalahan SDM yang harus dihadapi adalah adanya *mismatch* antara *supply* dan kebutuhan tenaga kesehatan. Disamping hal tersebut, permasalahan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan rekomendasi pembukaan sekolah tenaga kesehatan sehingga analisis kebutuhan tenaga kesehatan perlu dikaitkan dengan kapasitas produksi. Kapasitas produksi tenaga kesehatan tidak terlepas dari Sistem Pendidikan Nasional. Pengembangan system pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, namun pembinaan teknis pendidikan tenaga kesehatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan.

Selain itu permasalahan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan juga terkait dengan pembagian kewenangan dalam pengaturan SDM Kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini diperlukan penanganan lebih seksama, didukung dengan regulasi yang memadai meliputi insentif, penghargaan dan sanksi (*reward-punishment*), dan sistem karir. Kompetensi tenaga kesehatan yang belum terstandarisasi disebabkan karena saat ini baru ada satu standar kompetensi (dokter umum & dokter gigi), *job description* masing-masing tenaga belum jelas, dan absennya dokter di Puskesmas. Kerangka hukum dalam pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, terutama dalam hal sertifikasi dan akreditasi di Indonesia perlu diperkuat, dalam kaitan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perekrutan tenaga kesehatan oleh daerah masih rendah karena keterbatasan formasi dan dana.

Secara ringkas, dikemukakan bahwa tantangan ke depan untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan yang masih terbatas adalah memperbaiki kualitas perencanaan, pengadaan/produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM Kesehatan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.

Berdasarkan Permenkes No. 64 Tahun 2015, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai unit eselon 2 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes.

Dalam pelaksanaannya, isu strategis dalam kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi teknis tenaga di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan masih belum sesuai dengan bidang kerjanya
2. Alokasi anggaran pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes yang terbatas dan belum sesuai dengan kebutuhan.
3. Mekanisme Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes yang masih belum ada
4. Kendala dalam ketersediaan data terkait kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan serta pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di lingkungan Poltekkes Kemenkes.
5. Sarana dan prasarana kerja yang masih belum memadai
6. Batas waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus didasarkan pada dinamika kependudukan. Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor pendidikan,

ekonomi, sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Kesehatan merupakan hak semua penduduk, sehingga ditetapkan target dan sasaran pembangunan kesehatan.

Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan bagi pengelola program terutama untuk menyusun perencanaan serta evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 256.461.700 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19% pertahun, maka jumlah penduduk pada tahun 2019 naik menjadi 268.074.600 orang.

Masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Pada tahun 2014 beberapa kebijakan telah ditempuh pemerintah untuk memperbaiki fundamental perekonomian agar tercipta fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi. Kedepannya, perekonomian Indonesia diperkirakan akan semakin baik, dengan kondisi makro ekonomi yang semakin kokoh, laju reformasi struktural yang semakin cepat, dan fundamental ekonomi yang semakin kuat. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan pada kisaran 5,4 - 5,8% dan tahun 2019 diperkirakan mencapai 6,5%. Namun perlu dicermati pemulihan ekonomi dunia yang diperkirakan masih akan berjalan lambat dan tidak merata serta tantangan baru di tingkat regional seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir tahun 2015.

Komponen pengukuran tingkat pembangunan manusia suatu negara yang cukup berpengaruh yaitu komponen pendidikan. Perubahan yang terjadi secara terus menerus pada perilaku masyarakat disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu syarat mutlak pencapaian tujuan pembangunan manusia, dan merupakan target pembangunan sekaligus sarana pembangunan nasional. Pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, yaitu rata-rata lama sekolah, kepemilikan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang pada akhirnya akan menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi dasar untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Terkait dengan kualitas hidup manusia, ada kecenderungan semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki maka pengetahuan pun semakin banyak dan berakibat pada meningkatnya kualitas hidup terutama di bidang kesehatan dan perumahan.

BAB IV

KEGIATAN PELAKSANAAN DAN TARGET KINERJA, KERANGKA PENDANAAN KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. KEGIATAN PELAKSANAAN DAN TARGET KINERJA

Dalam rangka mendukung meningkatnya dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, kegiatan pelaksanaan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan meliputi :

a. Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi :

1) Program dan anggaran, yang meliputi:

- a) Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang sebanyak 6 dokumen;
- b) Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan sebanyak 15 dokumen;
- c) Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarannya sebanyak 49 satker;
- d) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran sebanyak 5 dokumen.

2) Data dan Informasi, yang meliputi :

- a) Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara teratur sebanyak 136 dokumen;
- b) Jumlah dokumen deskripsi data dan informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen;
- c) Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi SDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen;
- d) Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi dan konsultasi data dan informasi sebanyak 5 dokumen.

3) Evaluasi dan Pelaporan, yang meliputi :

- a) Jumlah satker yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program PPSDM Kesehatan sebanyak 72 dokumen
- b) Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 10 dokumen
- c) Jumlah Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 10 dokumen

- d) Jumlah dokumen rekonsiliasi review capaian program PPSDM Kesehatan sebanyak 21 dokumen
- e) Jumlah dokumen dalam rangka koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik lintas sektor dan program PPSDM Kesehatan sebanyak 10 dokumen

b. Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat :

1) Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi :

- a) Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan sebanyak 100 dokumen
- b) Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
- c) Jumlah dokumen kajian regulasi bidang SDM Kesehatan sebanyak 25 dokumen.

2) Organisasi dan Tata Laksana, yang meliputi:

- a) Jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen;
- b) Jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen;
- c) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen;
- d) Jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan BPPSDMK sebanyak 9 dokumen;
- e) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen.

3) Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang meliputi:

- a) Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani sebanyak 50 permasalahan;
- b) Jumlah jenis media penyebaran informasi terkait program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak sebanyak 7 jenis media
- c) Jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak sebanyak 45.000 buletin
- d) Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen

c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara :

1) Perbendaharaan, yang meliputi :

- a) Jumlah dokumen laporan keuangan bendahara berbasis akrual di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
- b) Jumlah dokumen rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pada setiap satker sebanyak 5 dokumen
- c) Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APF (Itjen, BPK dan BPKP) sebesar 80 % pada tahun 2019
- d) Jumlah dokumen pembinaan perbendaharaan dan BLU sebanyak 10 dokumen
- e) Jumlah dokumen fasilitasi PK BLU sebanyak 5 dokumen

2) Verifikasi dan akuntansi, yang meliputi :

- a) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 10 dokumen;
- b) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 10 dokumen;
- c) Jumlah Dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 20 dokumen;
- d) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 20 dokumen;
- e) Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan sebanyak 5 dokumen.

3) Pengelolaan Barang Milik Negara, yang meliputi:

- a) Jumlah Dokumen Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 20 dokumen;
- b) Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMN dilingkungan Sekretariat BPPSDM Kesehatan sebanyak 1 dokumen
- c) Jumlah satker yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan BMN sebanyak 60 satker;
- d) Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan sebanyak 5 dokumen
- e) Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyusunan RK-BMN di Lingkungan satker Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 8 dokumen

d. Kepegawaian dan Umum :

1) Pengembangan Pegawai, yang meliputi :

- a) Jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional sebanyak 20 dokumen
- b) Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel sebanyak 5 dokumen
- c) Jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen sebanyak 5 dokumen
- d) Jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada sebanyak 5 dokumen
- e) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU sebanyak 5 dokumen
- f) Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes sebanyak 5 dokumen

2) Pengadaan dan Mutasi Pegawai, yang meliputi :

- a) Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen
- b) Jumlah dokumen perencanaan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen;
- c) Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen;
- d) Jumlah dokumen pengisian jabatan di Lingkungan Sekretariat Badan PPSDMK sebanyak 10 dokumen
- e) Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di Lingkungan Sekretariat Badan PPSDMK sebanyak 5 dokumen

3) Umum dan Layanan Pengadaan, yang meliputi :

- a) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi *Electronic Filling System* di Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
- b) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penyusutan arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen

- c) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
- d) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji sebanyak 5 dokumen
- e) Jumlah dokumen hasil pelaksanaan rumah tangga perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 5 dokumen
- f) Jumlah dokumen hasil pelayanan pengadaan sebanyak 5 dokumen

e. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi :

- 1) Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 100.000 lulusan
- 2) Jumlah kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit sebanyak 760 kegiatan
- 3) Jumlah penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 529 judul penelitian

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Selain itu, perkiraan maju perencanaan anggaran tahun selanjutnya sangat memperhatikan evaluasi atas hasil capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, maka pendanaan dialokasikan untuk 1) penyelenggaraan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan, 2) penyelenggaraan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat, 3) penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, 4) peningkatan manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, serta 5) peningkatan pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi.

Untuk mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan juga memberikan pendanaan bagi daerah melalui dana Dekonsentrasi.

Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan serta Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program PPSDM Kesehatan serta Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
a.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	7.76	27.17	33.24	39.47	45.90	153.54
b.	Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	3.61	3.76	5.15	5.91	6.79	25.22
c.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.80	4.36	5.02	5.78	6.64	25.60
d.	Kepegawaian dan Umum	1148.73	1207.76	1233.20	1267.15	1280.32	6,137.16
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	150.00	289.25	318.19	359.89	481.75	1,599.08
JUMLAH		330.69	1,313.90	1,532.30	1,594.80	1,678.20	1,821.40

C. KERANGKA REGULASI

Agar pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dapat berjalan dengan baik, diperlukan dukungan kerangka regulasi.

Regulasi-regulasi yang akan disusun/disempurnakan oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan pada tahun 2015 - 2019 meliputi dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, rancangan Keputusan Menteri Kesehatan, rancangan Pedoman Teknis, rancangan Petunjuk Teknis, Prosedur Tetap, Perjanjian Kerjasama dan standar/prosedur terkait Program PPSDM Kesehatan termasuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dihadapkan dengan berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang manajemen dan administrasi kesehatan. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dituntut untuk terus melakukan peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan pemerintah lintas Kementerian/Lembaga. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi.

Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kerangka kelembagaan ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas proses bisnis untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja;
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses bisnis;
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses bisnis;
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder;
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI PELAKSANAAN

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Oleh karenanya penyelenggaraan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan harus mengacu pada dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yaitu : (1) Perikemanusiaan, (2) Pemberdayaan dan kemandirian, (3) Adil dan Merata, dan (4) Pengutamaan dan manfaat.

A. VISI

Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Aksi Kejiata Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mengacu pada Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilakukan upaya melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan adalah sebagai upaya terselenggaranya pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah sebagai upaya pemenuhan baik jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang bermutu.

Indikator yang dipergunakan dalam memantau dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan adalah :

- a. Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarana
- b. Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan
- c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan

Sedangkan Indikator untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi adalah Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI.

D. ARAH KEBIJAKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan serta Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi harus mengacu pada kebijakan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang telah ditetapkan. Arah kebijakan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

adalah terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

E. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai pada Tahun 2015 – 2019 adalah :

1. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, yang meliputi :
 - a. Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarana sebanyak 49 Satker
 - b. Jumlah Norma Standar Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan sebanyak 100 dokumen
 - c. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program PPSDM Kesehatan 34 dokumen.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi, yaitu jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 100.000 orang

Selanjutnya pencapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) setiap tahunnya dapat digambarkan pada tabel 3.1 berikut,

Tabel 3. 1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2015 - 2019

INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	Satuan kerja baik satker pusat maupun UPT yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional	Merekap jumlah satuan kerja yang telah mendapatkan alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional	6	14	21	31	49
Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.	Menghitung jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun/dibuat/dihasilkan oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.	20	20	20	20	20
Jumlah dokumen Data dan informasi Tenaga Kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara teratur	Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Merekap Dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang sudah melalui proses update secara berjenjang dan telah divalidasi yang berasal dari seluruh provinsi	-	34	34	34	34
Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah peserta didik yang diluluskan/dihasilkan oleh Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

F. STRATEGI PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, perlu diterapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran berdasarkan anggaran berbasis kinerja (*performances based budgetting*) yang mengutamakan azas pembiayaan sesuai fungsi (*money follow function*), dan sejalan dengan persamaan gender
2. mengelola data dan informasi secara terintegrasi melalui sistem berbasis aplikasi elektronik yang diarahkan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat (*validity*), lengkap (*completeness*) dan tepat waktu (*real time*) yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan serta perencanaan kebijakan program Badan PPSDM Kesehatan berbasis bukti
3. menerapkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Program PPSDM Kesehatan yang terukur, terarah dan tepat guna yang dilaksanakan dan dilembagakan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik
4. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik negara secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa fungsional diarahkan dalam mewujudkan tertib administrasi dan optimalisasi keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6. melaksanakan pengembangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PPSDM Kesehatan serta pembinaan dan layanan hukum dilandaskan pada azas berkeadilan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait.
7. melaksanakan penataan dan evaluasi organisasi serta ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan mengacu pada perkembangan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
8. mengembangkan kebijakan kehumasan ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berlandaskan pada azas keterbukaan
9. menyusun perencanaan dan pengembangan kepegawaian di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan kebutuhan dan kesetaraan gender
10. melaksanakan tata kelola persuratan, kearsipan, penggajian serta melaksanakan layanan pengadaan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan reformasi birokrasi
11. Standarisasi operasional kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program PPSDM Kesehatan serta kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan penilaian adalah 2 (dua) unsur dari pengawasan yang merupakan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaannya sesuai rencana, ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. PEMANTAUAN

Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui kemajuan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang dilakukan secara berkesinambungan selama kurun waktu Tahun 2015-2019. Dengan demikian pemantauan ditekankan pada *input* dan proses penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung yaitu mendatangi obyek yang menjadi sasaran pemantauan, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis data atas laporan penyelenggaraan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Pemantauan ini juga bagian dari pengawasan melekat.

Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sejalan dengan penyusunan laporan triwulan oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

B. EVALUASI

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan selama kurun waktu 2015-2019.

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 dilakukan sebagai berikut :

1. Evaluasi tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang dituangkan dalam laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan;
2. Evaluasi tengah periode (*Midterm Evaluation*) yang dilakukan pada Tahun 2017;
3. Evaluasi akhir (*Endterm Evaluation*) yang dilakukan pada akhir Tahun 2019 atau awal 2020.

Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing kegiatan.

Khusus untuk evaluasi tahunan, disamping dilakukan evaluasi terhadap sasaran strategis dan sasaran kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, juga dilakukan evaluasi terhadap pencapaian hasil luaran (*output*) dari setiap pelaksanaan kegiatan, masing-masing kegiatan serta realisasi anggarannya.

Agar Evaluasi Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan penguatan pelaporan pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang dipadukan dalam Sistem Informasi Manajemen Badan PPSDM Kesehatan.

Semua hasil penilaian Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019, baik evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir periode, didokumentasikan dalam bentuk laporan.

**MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PPSDM KESEHATAN										
a.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan	1) Program dan Anggaran, yang meliputi:							
			(a) Penyusunan rencana dan program Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Midterm Reviu RAP, Draft RAK	Menghitung jumlah dokumen rencana program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Midterm Reviu RAP, Draft RAK yang telah dibuat baik dalam bentuk bahan maupun draft		2	1	1
			(b) Penyusunan program dan anggaran tahunan	Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan	Dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L	Menghitung jumlah dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L yang telah dibuat selama 1 tahun anggaran		3	3	3
			(c) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi program dan anggaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran	Dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran		1	1	1
			(d) Peningkatan sarana dan prasarana Satker Pusat dan UPT Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	Satuan kerja baik satker pusat maupun UPT yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional	Merekap jumlah satuan kerja yang telah mendapatkan alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional	49	6	14	21
			2) Data dan Informasi, yang meliputi:							
			(a) Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Jumlah dokumen Data dan informasi Tenaga Kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara teratur	Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Merekap Dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang sudah melalui proses update secara berjenjang dan telah divalidasi yang berasal dari seluruh provinsi		-	34	34

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET			
								2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			(b) Pemetaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dalam Angka dari seluruh Provinsi	Dokumen Data dan Informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dalam Angka yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kes	Menghitung jumlah dokumen data dan informasi program PPSDMK Dalam Angka yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kes dari Seluruh Provinsi		34	34	34	
			(c) Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan	dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Pengembangan Sistem Manajemen Website Badan PPSDM Kesehatan yang dibuat setiap tahun		1	1	1	
			(d) Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait Data dan Informasi	Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi	Dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi	Menghitung dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi		1	1	1	
			(e) Pengelolaan dan Pemantauan Jaringan Komputer Terpadu Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pemantauan jaringan komputer terpadu Badan PPSDM Kes	dokumen hasil pengelolaan dan pemantauan jaringan komputer terpadu Badan PPSDM Kes	Menghitung jumlah dokumen hasil pengelolaan dan pemantauan jaringan komputer terpadu Badan PPSDM Kes yang dibuat setiap tahun		1	1	1	
			3) Evaluasi dan Pelaporan, yang meliputi:								
			(a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang mendapatkan monitoring (pemantauan) dan evaluasi program PPSDM Kesehatan melalui pengumpulan data, memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan baik melalui media komunikasi dan surat dinas (laporan) dll berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas	Menghitung jumlah satker yang mendapatkan monitoring (pemantauan) dan evaluasi program PPSDM Kesehatan melalui pengumpulan data, memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan baik melalui media komunikasi dan surat dinas (laporan) dll berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas	12	12	15	15	
			(b) Penyusunan dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan yakni Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan) selama 5 Tahun yang dijabarkan per Tahun	2	2	2	2	
			(c) Penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Kinerja adalah dokumen LAKIP Eselon I dan II.	Menghitung jumlah Laporan Kinerja Eselon I (Badan PPSDM kesehatan) dan Laporan Kinerja Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM kesehatan) selama 5 Tahun yang dijabarkan per Tahun.	2	2	2	2	

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			(d) Rekonsiliasi Review Dan Capaian Program BPPSDMK	Jumlah dokumen rekonsiliasi review capaian program PPSDM Kesehatan	Dokumen rekonsiliasi review dalam rangka capaian program PPSDM Kesehatan setiap Triwulan per Tahun, dan dokumen laporan Midterm Review	Menghitung jumlah dokumen Laporan Triwulan, dan dokumen Midterm Review yang dihasilkan pada Tahun ke-3 (2017) selama 5 Tahun.	26	4	4	5
			(e) Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas sektor dan program	Jumlah dokumen dalam rangka koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik lintas sektor dan program PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan yang disusun dalam rangka koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas sektor dan program PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas sektor dan program PPSDM Kesehatan yang telah disusun per Semester per Tahun selama 5 Tahun	10	2	2	2
	b. Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat	1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :							
			(a) Penyusunan Regulasi bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.	Menghitung jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.	166	20	20	20
			(b) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang dibuat setiap tahun		1	1	1
			(c) Kajian Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kajian regulasi bidang SDM Kesehatan	dokumen regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian kerjasama, dll	Menghitung jumlah regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah dikaji		5	5	5
			2) Organisasi dan Tata Laksana, yang meliputi:							
			(a) Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	Dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK yang meliputi dokumen pembinaan keorganisasian, ketatalaksanaan dan evaluasi organisasi	Menghitung jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	1	1	1	1
			(b) Pelaksanaan penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan di lingkungan Badan PPSDMK yang meliputi pendirian program studi/jurusan baru, perubahan kelembagaan, klasifikasi UPT	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan di lingkungan Badan PPSDMK	1	1	1	1
			(c) Pelaksanaan evaluasi Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK yang dibuat setiap tahun	1	1	1	1

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET			
								2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			(d) Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan BPPSDMK	Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan yang meliputi dokumen Bisnis Proses, Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Info Jabatan, Tata Hubungan Kerja, Standar Operasional Prosedur baik untuk UPT maupun Sekretariat dan Pusat-pusat di Lingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan UPT, Sekretariat dan Pusat-pusat di Lingkungan BPPSDMK		2	3	2	
			(e) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	Dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	1	1	1	1	
			3) Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang meliputi:								
			(a) Layanan Hukum di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani	Permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani (tahap klarifikasi, peninjauan lapangan, kajian hukum, laporan, sampai penyelesaian)	Menghitung jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	20	10	10	10	
			(b) Penyusunan dokumentasi, Informasi dan Kehumasan	Jumlah jenis media penyebaran informasi terkait program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak	Jenis media penyebaran informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster, video dan roll banner SDM Kesehatan yang telah dicetak	Menghitung jumlah jenis media penyebaran informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster, video dan roll banner SDM Kesehatan yang telah dicetak		6	6	6	
			(c) Penyusunan dokumentasi Kegiatan Pimpinan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak	Buletin SDM Kesehatan yang diterbitkan	Menghitung jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak dan diterbitkan	45000	9000	9000	9000	
			(d) Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi penambahan judul dan jumlah buku perpustakaan	Menghitung jumlah dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan setiap tahun	1	1	1	1	
			1) Perbendaharaan, yang meliputi:								
	c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan Barang Milik negara di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan secara profesional, transparan dan	(a) Rekonsiliasi laporan keuangan dengan Biro Keuangan Setjen Kemenkes	Jumlah laporan keuangan bendahara berbasis akrual di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan keuangan bendahara yang berbasis akrual di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan keuangan bendahara di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan		1	1	1	
			(b) Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pada setiap satker	Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDMK		1	1	1	
			(c) Pemantauan dan Pemutakhiran TL LHP dan Pengaduan Masyarakat	Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APF (Itjen, BPK dan BPKP)	Laporan hasil pemeriksaan oleh APF yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK dan Satker Pusat di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah LHP yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK dan Satker Pusat dibandingkan dengan jumlah LHP keseluruhan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dikalikan 100 %		60	65	70	
			(d) Pembinaan Perbendaharaan dan BLU	Jumlah dokumen pembinaan perbendaharaan dan BLU	Dokumen hasil pembinaan perbendaharaan dan BLU	Menghitung jumlah dokumen hasil pembinaan perbendaharaan dan BLU		2	2	2	

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(e) Pelaksanaan Fasilitas PK BLU	Jumlah dokumen fasilitas PK BLU	Dokumen fasilitas PK BLU Poltekkes Kemenkes RI	Menghitung jumlah dokumen fasilitas PK BLU Poltekkes Kemenkes RI		1	1	1
			2) Verifikasi dan Akuntansi, yang meliputi:							
			(a) Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dengan satker (Pusat, UPT Vertikal dan Dekonsentrasi), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes setiap triwulan, serta Laporan review Keuangan dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes Setiap Semester	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dan Laporan Review Keuangan yang telah dibuat		2	2	2
			(b) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat		2	2	2
			(c) Penyusunan Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan TR-PNBP Badan PPSDM Kesehatan dengan satker, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes serta Kementerian Keuangan tiap semester	Menghitung jumlah dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat per enam bulan setiap tahun		2	-	2
			(d) Penyusunan Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan dengan satker, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes dan Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan setiap triwulan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat per tiga bulan setiap tahun		4	4	4
			(e) Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan	Dokumen Bimbingan Teknis yang berupa terkait penyusunan Laporan Keuangan SAIBA, TRPNBP dan BLU pada satker di lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Bimbingan Teknis yang berupa terkait penyusunan Laporan Keuangan SAIBA, TRPNBP dan BLU pada satker di lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1
			3) Pengelolaan Barang Milik Negara, yang meliputi :							
			(a) Penyusunan Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen yang berisi Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretariat BPPSDM Kesehatan Semester I dan Semester II (Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal	Menghitung jumlah dokumen laporan SIMAK BMN Set.BPPSDMK Semester I dan Semester II (Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal, yang telah disusun setiap tahun		4	4	4
			(b) Pelaksanaan Reinventarisasi BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMN di lingkungan Set. BPPSDM Kesehatan	Dokumen yang berisi pelaksanaan kegiatan inventarisasi BMN di lingkungan Set. BPPSDM Kesehatan yang dilakukan setiap 5 tahun	Menghitung jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Inventarisasi BMN di lingkungan Set. BPPSDM Kesehatan dalam 5 tahun terakhir		-	1	-
			(c) Pelaksanaan Bimbingan Pengelolaan BMN di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan BMN	Dokumen yang berisi laporan pelaksanaan Bimtek pengelolaan BMN pada satker di lingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah satker yang telah mendapatkan Bimbingan teknis Pengelolaan BMN yang dilakukan setiap tahun		12	12	12

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(d) Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Dokumen yang berisikan laporan kegiatan penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat BPPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah laporan penatausahaan BMN yang dilakukan setiap tahun		1	1	1
			(e) Penyusunan Laporan RK-BMN Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyusunan RK-BMN di Lingkungan satker Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan hasil penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (Pembangunan Gedung Kantor, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara) satker Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen laporan hasil penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (Pembangunan Gedung Kantor, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara) satker Badan PPSDM Kesehatan	-	2	2	
d.	Kepegawaian dan Umum	Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	1) Pengembangan Pegawai, yang meliputi:							
			(a) Pelaksanaan penyiapan pengembangan karir pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional	Dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional	Menghitung jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional		4	4	4
			(b) Pelaksanaan seleksi administrasi tugas belajar dan ijin belajar pegawai Badan PPSDM Kesehatan dan UPTnya	Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel	Dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel		1	1	1
			(c) Penyiapan usulan sertifikasi Dosen Poltekkes Kemenkes	Jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	Dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	Menghitung jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen		1	1	1

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET			
								2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			(d) Pelaksanaan usulan penghargaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada	Dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada	Menghitung jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada		1	1	1	
			(f) Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU	Dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU		1	1	1	
			(g) Penilaian angka kredit Dosen Poltekkes Kemenkes	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes	Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes		1	1	1	
			2) Pengadaan dan Mutasi Pegawai, yang meliputi:								
			(a) Analisis kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1	
			(b) Perencanaan pegawai	Jumlah dokumen perencanaan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen perencanaan pegawai (bezzeting Pegawai) di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen perencanaan pegawai (bezzeting Pegawai) di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1	
			(c) Mutasi pegawai	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai (pindah pegawai, kenaikan pangkat, pensiun) di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai (pindah pegawai, kenaikan pangkat, pensiun) di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1	
			(e) Pengisian jabatan	Jumlah dokumen pengisian jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen pengisian jabatan (Baperjakat Jabatan Administrator, Pengawas, Struktural & Direktur) dan pelantikan pegawai dalam jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen pengisian jabatan (Baperjakat Jabatan Administrator, Pengawas, Struktural & Direktur) dan pelantikan pegawai dalam jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK		2	2	2	
			(f) Penataan jabatan fungsional	Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan penataan jabatan fungsional (Peta jabatan fungsional) di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional (Peta jabatan fungsional) di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1	
			3) Umum dan Layanan Pengadaan, yang meliputi :								
			(a) Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System di Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System di Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1	
			(b) Penyusutan Arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusutan Arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1	

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(c) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1
			(d) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait advokasi urusan tata usaha dan gaji yang meliputi fasilitasi teknis tata usaha, sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji setiap Tahun		1	1	1
			(e) Pelaksanaan Rumah Tangga dan Perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/sarana dan prasarana dan layanan kesehatan klinik pratama Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/sarana dan prasarana dan layanan kesehatan klinik pratama Badan PPSDM Kesehatan		1	1	1
			(f) Pelayanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pengadaan	Dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan Pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan Pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan		1	1	1
KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI										
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi	1) Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah peserta didik yang diluluskan/dihasilkan oleh Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	15,000	20,000	20,000	20,000
			2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Menghitung jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit		76	114	152
			3) Pelaksanaan Penelitian bagi tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional	Menghitung jumlah judul penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional		38	76	114

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
	-	2 Sub Bag PA
	3	3 Sub Bag PA
	1	1 Sub Bag PA
	31	38
	34	34 Sub Bag Datin

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
34	34	Sub Bag Datin
1	1	Sub Bag Datin
1	1	Sub Bag Datin
1	1	Sub Bag Datin
15	15	Sub Bagian Evapor
2	2	Sub Bagian Evapor
2	2	Sub Bagian Evapor

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
4	4	Sub Bagian Evapor
2	2	Sub Bagian Evapor
20	20	Sub Bagian Hukum
1	1	Sub Bagian Hukum
5	5	Sub Bagian Hukum
1	1	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1	1	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1	1	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
1	1	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
1	1	Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana
10	10	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
6	7	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
9000	9000	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
1	1	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
1	1	Sub Bag Perbendaharaan
1	1	Sub Bag Perbendaharaan
75	80	Sub Bag Perbendaharaan
2	2	Sub Bag Perbendaharaan

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
1	1	1 Sub Bag Perbendaharaan
2	2	2 Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
2	2	2 Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
2	2	2 Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
4	4	4 Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
1	1	1 Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
4	4	Sub Bag Pengelolaan BMN
-	-	Sub Bag Pengelolaan BMN
12	12	Sub Bag Pengelolaan BMN

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
1	1	Sub Bag Pengelolaan BMN
2	2	Sub Bag Pengelolaan BMN
4	4	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
2	2	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan

		UNIT ORGANISASI
2018	2019	PELAKSANA
(11)	(12)	(11)
1	1	1 Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	1 Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	1 Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan
1	1	1 Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan
20,000	20,000	Politeknik Kesehatan
190	228	Politeknik Kesehatan
137	164	Politeknik Kesehatan

**MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PPSDM KESEHATAN										
a.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan	1) Program dan Anggaran, yang meliputi:							
			(a) Penyusunan rencana dan program Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Draft RAK	Menghitung jumlah dokumen rencana program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Draft RAK yang telah dibuat baik dalam bentuk bahan maupun draft		2	1	1
			(b) Penyusunan program dan anggaran tahunan	Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan	Dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L	Menghitung jumlah dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L yang telah dibuat selama 1 tahun anggaran		3	3	3
			(c) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi program dan anggaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran	Dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran		1	1	1
			(d) Peningkatan sarana dan prasarana Satker Pusat dan UPT Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	Satuan kerja baik satker pusat maupun UPT yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional	Merekap jumlah satuan kerja yang telah mendapatkan alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional	49	6	14	21
			2) Data dan Informasi, yang meliputi:							
			(a) Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Jumlah dokumen Data dan informasi Tenaga Kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara teratur	Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Merekap Dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang sudah melalui proses update secara berjenjang dan telah divalidasi yang berasal dari seluruh provinsi		-	34	34

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
b.	Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat	1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi : (a) Penyusunan Regulasi bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.	Menghitung jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun/dibuat/dihasilkan oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.	166	20	20	20
			(b) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang dibuat setiap tahun		1	1	1
			(c) Kajian Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kajian regulasi bidang SDM Kesehatan	dokumen regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian kerjasama, dll	Menghitung jumlah regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah dikaji		5	5	5
			2) Organisasi dan Tata Laksana, yang meliputi:							
			(a) Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	Dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK yang meliputi dokumen pembinaan keorganisasian, ketatalaksanaan dan evaluasi organisasi	Menghitung jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	1	1	1	1
			(b) Pelaksanaan penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan di lingkungan Badan PPSDMK yang meliputi pendirian program studi/jurusan baru, perubahan kelembagaan, klasifikasi UPT	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan di lingkungan Badan PPSDMK	1	1	1	1
			(c) Pelaksanaan evaluasi Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK yang dibuat setiap tahun	1	1	1	1
			(d) Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan BPPSDMK	Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan yang meliputi dokumen Bisnis Proses, Analisis Beban Kerja, Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Info Jabatan, Tata Hubungan Kerja, Standar Operasional Prosedur baik untuk UPT maupun Sekretariat dan Pusat-pusat di Lingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan UPT, Sekretariat dan Pusat-pusat di Lingkungan BPPSDMK		2	3	2
			(e) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	Dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	1	1	1	1
			3) Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang meliputi:							

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			(a) Layanan Hukum di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani	Permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani (tahap klarifikasi, peninjauan lapangan, kajian hukum, laporan, sampai penyelesaian)	Menghitung jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	20	10	10	10
			(b) Penyusunan dokumentasi, Informasi dan Kehumasan	Jumlah jenis media penyebaran informasi terkait program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak	Jenis media penyebaran informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster, video dan roll banner SDM Kesehatan yang telah dicetak	Menghitung jumlah jenis media penyebaran informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster, video dan roll banner SDM Kesehatan yang telah dicetak		6	6	6
			(c) Penyusunan dokumentasi Kegiatan Pimpinan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak	Buletin SDM Kesehatan yang diterbitkan	Menghitung jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak dan diterbitkan	45000	9000	9000	9000
			(d) Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi penambahan judul dan jumlah buku perpustakaan	Menghitung jumlah dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan setiap tahun	1	1	1	1
	c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan Barang Milik negara di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan secara profesional, transparan dan	1) Perbendaharaan, yang meliputi:							
			(a) Rekonsiliasi laporan keuangan dengan Biro Keuangan Setjen Kemenkes	Jumlah laporan keuangan bendahara berbasis akrual di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan keuangan bendahara yang berbasis akrual di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan keuangan bendahara di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan		1	1	1
			(b) Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pada setiap satker	Dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDMK		1	1	1
			(c) Pemantauan dan Pemutakhiran TL LHP dan Pengaduan Masyarakat	Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APF (Itjen, BPK dan BPKP)	Laporan hasil pemeriksaan oleh APF yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK dan Satker Pusat di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah LHP yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK dan Satker Pusat dibandingkan dengan jumlah LHP keseluruhan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dikalikan 100 %		60	65	70
			(d) Pembinaan Perbendaharaan dan BLU	Jumlah dokumen pembinaan perbendaharaan dan BLU	Dokumen hasil pembinaan perbendaharaan dan BLU	Menghitung jumlah dokumen hasil pembinaan perbendaharaan dan BLU		2	2	2
			(e) Pelaksanaan Fasilitasi PK BLU	Jumlah dokumen fasilitasi PK BLU	Dokumen fasilitasi PK BLU Poltekkes Kemenkes RI	Menghitung jumlah dokumen fasilitasi PK BLU Poltekkes Kemenkes RI		1	1	1
			2) Verifikasi dan Akuntansi, yang meliputi:							
			(a) Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dengan satker (Pusat, UPT Vertikal dan Dekonsentrasi), Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Kementerian Keuangan dan Biro Keuangan dan BMN Kemenkes setiap triwulan, serta Laporan review Keuangan dengan Inspektorat Jenderal Kemenkes Setiap Semester	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dan Laporan Review Keuangan yang telah dibuat		2	2	2

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			(b) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat		2	2	2
			(c) Penyusunan Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan TR-PNBP Badan PPSDM Kesehatan dengan satker, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes serta Kementerian Keuangan tiap semester	Menghitung jumlah dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat per enam bulan setiap tahun		2	-	2
			(d) Penyusunan Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan dengan satker, Biro Keuangan dan BMN Kemenkes dan Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan setiap triwulan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat per tiga bulan setiap tahun		4	4	4
			(e) Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan	Dokumen Bimbingan Teknis yang berupa terkait penyusunan Laporan Keuangan SAIBA, TRPNBP dan BLU pada satker di lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Bimbingan Teknis yang berupa terkait penyusunan Laporan Keuangan SAIBA, TRPNBP dan BLU pada satker di lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1
			3) Pengelolaan Barang Milik Negara, yang meliputi :							
			(a) Penyusunan Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen yang berisi Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan dan Sekretariat BPPSDM Kesehatan Semester I dan Semester II(Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal	Menghitung jumlah dokumen laporan SIMAK BMN Set.BPPSDMK Semester I dan Semester II (Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal, yang telah disusun setiap tahun		4	4	4
			(b) Pelaksanaan Reinventarisasi BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMN dilingkungan Set. BPPSDM Kesehatan	Dokumen yang berisi pelaksanaan kegiatan inventarisasi BMN dilingkungan Set. BPPSDM Kesehatan yang dilakukan setiap 5 tahun	Menghitung jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Inventarisasi BMN dilingkungan Set. BPPSDM Kesehatan dalam 5 tahun terakhir		-	1	-
			(c) Pelaksanaan Bimbingan Pengelolaan BMN di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan BMN	Dokumen yang berisi laporan pelaksanaan Bimtek pengelolaan BMN pada satker dilingkungan BPPSDMK	Menghitung jumlah satker yang telah mendapatkan Bimbingan teknis Pengelolaan BMN yang dilakukan setiap tahun		12	12	12
			(d) Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Dokumen yang berisikan laporan kegiatan penatausahaan BMN dilingkungan Sekretariat BPPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah laporan penatausahaan BMN yang dilakukan setiap tahun		1	1	1
			(e) Penyusunan Laporan RK-BMN Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyusunan RK-BMN di Lingkungan satker Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen laporan hasil penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (Pembangunan Gedung Kantor, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara) satker Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen laporan hasil penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (Pembangunan Gedung Kantor, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara) satker Badan PPSDM Kesehatan		-	2	2
d.	Kepegawaian dan Umum	Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	1) Pengembangan Pegawai, yang meliputi:							
			(a) Pelaksanaan penyiapan pengembangan karir pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional	Dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional	Menghitung jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional		4	4	4

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			(b) Pelaksanaan seleksi administrasi tugas belajar dan ijin belajar pegawai Badan PPSDM Kesehatan dan UPTnya	Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel	Dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel		1	1	1
			(c) Penyiapan usulan sertifikasi Dosen Poltekkes Kemenkes	Jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	Dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	Menghitung jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen		1	1	1
			(d) Pelaksanaan usulan penghargaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada	Dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada	Menghitung jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada		1	1	1
			(f) Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU	Dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, alih jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU		1	1	1
			(g) Penilaian angka kredit Dosen Poltekkes Kemenkes	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes	Dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes		1	1	1
			2) Pengadaan dan Mutasi Pegawai, yang meliputi:							
			(a) Analisis kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1
			(b) Perencanaan pegawai	Jumlah dokumen perencanaan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen perencanaan pegawai (bezzeting Pegawai) di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen perencanaan pegawai (bezzeting Pegawai) di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1
			(c) Mutasi pegawai	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai (pindah pegawai, kenaikan pangkat, pensiun) di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai (pindah pegawai, kenaikan pangkat, pensiun) di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1
			(e) Pengisian jabatan	Jumlah dokumen pengisian jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen pengisian jabatan (Baperjakat Jabatan Administrator, Pengawas, Struktural & Direktur) dan pelantikan pegawai dalam jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen pengisian jabatan (Baperjakat Jabatan Administrator, Pengawas, Struktural & Direktur) dan pelantikan pegawai dalam jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK		2	2	2
			(f) Penataan jabatan fungsional	Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di Lingkungan Badan PPSDMK	Dokumen laporan penataan jabatan fungsional (Peta jabatan fungsional) di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional (Peta jabatan fungsional) di Lingkungan Badan PPSDMK		1	1	1

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3) Umum dan Layanan Pengadaan, yang meliputi :							
			(a) Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System di Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System di Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1
			(b) Penyusutan Arsip pada Sekretariat Badan PPPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusutan Arsip pada Sekretariat Badan PPPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan penyusutan arsip pada Sekretariat Badan PPPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1
			(c) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun		1	1	1
			(d) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait advokasi urusan tata usaha dan gaji yang meliputi fasilitasi teknis tata usaha, sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji setiap Tahun		1	1	1
			(e) Pelaksanaan Rumah Tangga dan Perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/sarana dan prasarana dan layanan kesehatan klinik pratama Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/sarana dan prasarana dan layanan kesehatan klinik pratama Badan PPSDM Kesehatan		1	1	1
			(f) Pelayanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pengadaan	Dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan Pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan Pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan		1	1	1
KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI										
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi	1) Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah peserta didik yang diluluskan/dihasilkan oleh Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.	15,000	20,000	20,000	20,000
			2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Menghitung jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit		76	114	152

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	BASELINE (2014)	TARGET		
								2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3) Pelaksanaan Penelitian bagi tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional	Menghitung jumlah judul penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional		38	76	114

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
	-	2 Sub Bag PA
	3	3 Sub Bag PA
	1	1 Sub Bag PA
	31	49 Sub Bag PA
	34	34 Sub Bag Datin

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
1	1	Sub Bag Datin
1	1	Sub Bag Datin
1	1	Sub Bag Datin
15	15	Sub Bagian Evapor
2	2	Sub Bagian Evapor
2	2	Sub Bagian Evapor
4	4	Sub Bagian Evapor
2	2	Sub Bagian Evapor

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
20	20	Sub Bagian PP
1	1	Sub Bagian PP
5	5	Sub Bagian PP
1	1	Sub Bagian Ortala
1	1	Sub Bagian Ortala
1	1	Sub Bagian Ortala
1	1	Sub Bagian Ortala
1	1	Sub Bagian Ortala

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
10	10	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
6	7	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
9000	9000	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
1	1	Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
1	1	Sub Bag Perbendaharaan
1	1	Sub Bag Perbendaharaan
75	80	Sub Bag Perbendaharaan
2	2	Sub Bag Perbendaharaan
1	1	Sub Bag Perbendaharaan
2	2	Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
2	2	Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
2	2	Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
4	4	Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
1	1	Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
4	4	Sub Bag Pengelolaan BMN
-	-	Sub Bag Pengelolaan BMN
12	12	Sub Bag Pengelolaan BMN
1	1	Sub Bag Pengelolaan BMN
2	2	Sub Bag Pengelolaan BMN
4	4	Sub Bagian Pengembangan Pegawai

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengembangan Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
2	2	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
1	1	Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
1	1	Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
20,000	20,000	Politeknik Kesehatan
190	228	Politeknik Kesehatan

		UNIT ORGANISASI PELAKSANA
2018	2019	
(12)	(13)	(14)
137	164	Politeknik Kesehatan

**MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
						2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PPSDM KESEHATAN						1,163.90	1,243.05	1,276.61	1,318.31	1,339.65	6,341.52
a.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	Terselenggaranya penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan	1) Program dan Anggaran, yang meliputi:			7.76	27.17	33.24	39.47	45.90	153.54
			(a) Penyusunan rencana dan program Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Jumlah dokumen bahan rencana, program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang	Menghitung jumlah dokumen rencana program dan anggaran Badan PPSDM Kesehatan jangka menengah dan jangka panjang berupa bahan RPJMN, bahan Renstra, Draft RAP, Draft RAK yang telah dibuat baik dalam bentuk bahan maupun draft						
			(b) Penyusunan program dan anggaran tahunan	Jumlah dokumen program dan anggaran tahunan	Menghitung jumlah dokumen program dan anggaran tahunan berupa dokumen RKP, Renja K/L, RKA-K/L yang telah dibuat selama 1 tahun anggaran						
			(c) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi program dan anggaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi program dan anggaran						
			(d) Peningkatan sarana dan prasarana Satker Pusat dan UPT Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang ditingkatkan sarana dan prasarannya	Merekap jumlah satuan kerja yang telah mendapatkan alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan telah diselenggarakan oleh satker antara lain dalam bentuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM, pengadaan tanah, pengadaan alat laboratorium, alat peraga pelatihan, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dan pengadaan kendaraan operasional						

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
						2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			2) Data dan Informasi, yang meliputi:								
			(a) Dokumen Data dan Informasi tenaga kesehatan yang sudah terupdate setiap tahunnya secara berjenjang dan telah divalidasi dari seluruh provinsi	Jumlah dokumen Data dan informasi Tenaga Kesehatan di seluruh provinsi yang terupdate secara teratur	Merekap Dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang sudah melalui proses up date secara berjenjang dan telah divalidasi yang berasal dari seluruh						
			(b) Pemetaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Deskripsi Data dan Informasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen deskripsi data dan informasi program PPSDMK yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kes						
			(c) Pengelolaan Sistem Informasi SDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi SDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi SDM Kesehatan						
			(d) Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi terkait Data dan Informasi	Jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi	Menghitung jumlah dokumen hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Data dan Informasi						
			3) Evaluasi dan Pelaporan, yang meliputi:								
			(a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) program PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang mendapatkan monitoring dan evaluasi program PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah satker yang mendapatkan monitoring (pemantauan) dan evaluasi program PPSDM Kesehatan melalui pengumpulan data, memantau perkembangan pelaksanaan program yang dilakukan baik melalui media komunikasi dan surat dinas (laporan) dll berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi SMART dan e-Monev Bappenas						
			(b) Penyusunan dokumen laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah Laporan Tahunan Badan PPSDM Kesehatan yakni Laporan Tahunan Eselon I (Badan PPSDM Kesehatan) dan Laporan Tahunan Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan) selama 5 Tahun yang dijabarkan per Tahun						
			(c) Penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah Laporan Kinerja Eselon I (Badan PPSDM kesehatan) dan Laporan Kinerja Eselon II (Sekretariat Badan PPSDM kesehatan) selama 5 Tahun yang dijabarkan per Tahun.						

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
						2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(d) Rekonsiliasi Review Dan Capaian Program BPPSDMK	Jumlah dokumen rekonsiliasi review capaian program PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Triwulan, dan dokumen Midterm Review yang dihasilkan pada Tahun ke-3 (2017) selama 5 Tahun.						
			(e) Koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas sektor dan program	Jumlah dokumen dalam rangka koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan baik lintas sektor dan program PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas sektor dan program PPSDM Kesehatan yang telah disusun per Semester per Tahun selama 5 Tahun						
	b. Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya penyiapan urusan hukum, penataan organisasi dan hubungan masyarakat	1) Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :			3.61	3.76	5.15	5.91	6.79	25.22
			(a) Penyusunan Regulasi bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen rancangan peraturan yang disusun/dibuat/dihasilkan oleh pusat-pusat dan sekretariat di lingkungan Badan PPSDMK dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK.						
			(b) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan kegiatan sosialisasi bidang hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang dibuat setiap tahun						
			(c) Kajian Regulasi Bidang SDM Kesehatan	Jumlah dokumen kajian regulasi bidang SDM Kesehatan	Menghitung jumlah regulasi bidang SDM Kesehatan yang telah dikaji						
			2) Organisasi dan Tata Laksana, yang meliputi:								
			(a) Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan Pembinaan Organisasi UPT Badan PPSDMK						
			(b) Pelaksanaan penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil penyiapan bahan Penataan di lingkungan Badan PPSDMK						
			(c) Pelaksanaan evaluasi Organisasi di lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah laporan hasil pelaksanaan evaluasi keorganisasian, ketatalaksanaan di lingkungan Badan PPSDMK yang dibuat setiap tahun						
			(d) Penyusunan Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan BPPSDMK	Menghitung jumlah dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan UPT, Sekretariat dan Pusat-pusat di Lingkungan BPPSDMK						

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)	
						2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			(e) Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di Badan PPSDMK							
			3) Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat, yang meliputi:									
			(a) Layanan Hukum di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah permasalahan hukum pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang telah tertangani	Menghitung jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani pada satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan							
			(b) Penyusunan dokumentasi, Informasi dan Kehumasan	Jumlah jenis media penyebaran informasi terkait program PPSDM Kesehatan yang telah dicetak	Menghitung jumlah jenis media penyebaran informasi berupa buletin, spanduk, leaflet, poster, video dan roll banner SDM Kesehatan yang telah dicetak							
			(c) Penyusunan dokumentasi Kegiatan Pimpinan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak	Menghitung jumlah buletin SDM Kesehatan yang telah dicetak dan diterbitkan							
			(d) Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan setiap tahun							
	c. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Terselenggaranya pengelolaan keuangan dan Barang Milik negara di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan secara profesional, transparan dan akuntabel sesuai	1) Perbendaharaan, yang meliputi:			3.80	4.36	5.02	5.78	6.64	25.60	
			(a) Rekonsiliasi laporan keuangan dengan Biro Keuangan Setjen Kemenkes	Jumlah laporan keuangan bendahara berbasis akrual di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan keuangan bendahara di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan							
			(b) Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pada setiap satker	Menghitung jumlah dokumen Rekonsiliasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan BPPSDMK							
			(c) Pemantauan dan Pemutakhiran TL LHP dan Pengaduan Masyarakat	Persentase upaya penyelesaian tindak lanjut LHP APF (Itjen, BPK dan BPKP)	Menghitung jumlah LHP yang ditindaklanjuti oleh Poltekkes, Bapelkes, BPPK dan Satker Pusat dibandingkan dengan jumlah LHP keseluruhan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan dikalikan 100 %							
			(d) Pembinaan Perbendaharaan dan BLU	Jumlah dokumen pembinaan perbendaharaan dan BLU	Menghitung jumlah dokumen hasil pembinaan perbendaharaan dan BLU							
			(e) Pelaksanaan Fasilitasi PK BLU	Jumlah dokumen fasilitasi PK BLU	Menghitung jumlah dokumen fasilitasi PK BLU Poltekkes Kemenkes RI							
			2) Verifikasi dan Akuntansi, yang meliputi:									

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)	
						2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
			(a) Penyusunan Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan Eselon I Badan PPSDM Kesehatan dan Laporan Review Keuangan yang telah dibuat							
			(b) Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat							
			(c) Penyusunan Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan TRPNBP Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat per enam bulan setiap tahun							
			(d) Penyusunan Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Keuangan BLU Badan PPSDM Kesehatan yang telah dibuat per tiga bulan setiap tahun							
			(e) Pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan	Jumlah Dokumen Bimbingan Teknis penyusunan laporan keuangan	Menghitung jumlah dokumen Bimbingan Teknis yang berupa terkait penyusunan Laporan Keuangan SAIBA, TRPNBP dan BLU pada satker di lingkungan Badan PPSDMK							
			3) Pengelolaan Barang Milik Negara, yang meliputi :									
			(a) Penyusunan Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan SIMAK BMN Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan SIMAK BMN Set.BPPSDMK Semester I dan Semester II (Tahunan) yang telah direview Inspektorat Jenderal, yang telah disusun setiap tahun							
			(b) Pelaksanaan Reinventarisasi BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Jumlah Dokumen Laporan Inventarisasi BMN dilingkungan Set. BPPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan Inventarisasi BMN dilingkungan Set. BPPSDM Kesehatan dalam 5 tahun terakhir							
			(c) Pelaksanaan Bimbingan Pengelolaan BMN di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah satker yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan BMN	Menghitung jumlah satker yang telah mendapatkan Bimbingan teknis Pengelolaan BMN yang dilakukan setiap tahun							
			(d) Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan BMN di lingkungan Sekretariat Badan	Menghitung jumlah laporan penatausahaan BMN yang dilakukan setiap tahun							
			(e) Penyusunan Laporan RK-BMN Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penyusunan RK-BMN di Lingkungan satker Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung Jumlah Dokumen laporan hasil penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Negara (Pembangunan Gedung Kantor, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara) satker Badan PPSDM Kesehatan							

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
						2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
d.	Kepegawaian dan Umum	Meningkatnya manajemen kepegawaian dan umum di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	1) Pengembangan Pegawai, yang meliputi:			1,148.73	1,207.76	1,233.20	1,267.15	1,280.32	6,137.16
			(a) Pelaksanaan penyiapan pengembangan karir pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional	Menghitung jumlah dokumen usulan promosi pegawai, Diklat PIM, Diklat teknis dan Diklat fungsional						
			(b) Pelaksanaan seleksi administrasi tugas belajar dan ijin belajar pegawai Badan PPSDM Kesehatan dan UPTnya	Jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil seleksi administrasi Tubel dan Ibel						
			(c) Penyiapan usulan sertifikasi Dosen Poltekkes Kemenkes	Jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen	Menghitung jumlah dokumen usulan dosen yang mengikuti sertifikasi dosen						
			(d) Pelaksanaan usulan penghargaan pegawai di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada	Menghitung jumlah dokumen usulan tanda kehormatan satyalancana karya satya dan penghargaan tanda bakti karya husada						
			(f) Administrasi Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan administrasi pengusulan pengangkatan pertama jabfung, alih jabfung, pembebasan sementara jabfung, pengangkatan kembali jabfung, pemberhentian jabfung, perubahan jabatan JFU						
			(g) Penilaian angka kredit Dosen Poltekkes Kemenkes	Jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Penetapan Angka Kredit (PAK) Dosen Poltekkes Kemenkes						
			2) Pengadaan dan Mutasi Pegawai, yang meliputi:								
			(a) Analisis kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK						
			(b) Perencanaan pegawai	Jumlah dokumen perencanaan pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen perencanaan pegawai (bezzeting Pegawai) di Lingkungan Badan PPSDMK						
			(c) Mutasi pegawai	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan administrasi mutasi pegawai (pindah pegawai, kenaikan pangkat, pensiun) di Lingkungan Badan PPSDMK						

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
						2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			(e) Pengisian jabatan	Jumlah dokumen pengisian jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen pengisian jabatan (Baperjakat Jabatan Administrator, Pengawas, Struktural & Direktur) dan pelantikan pegawai dalam jabatan di Lingkungan Badan PPSDMK						
			(f) Penataan jabatan fungsional	Jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional di Lingkungan Badan PPSDMK	Menghitung jumlah dokumen laporan penataan jabatan fungsional (Peta jabatan fungsional) di Lingkungan Badan PPSDMK						
			3) Umum dan Layanan Pengadaan, yang meliputi :								
			(a) Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Elektronik melalui aplikasi Electronic Filling System di Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun						
			(b) Penyusutan Arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyusutan Arsip pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun						
			(c) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen laporan yang telah dibuat selama 5 tahun dijabarkan setiap tahun						
			(d) Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji	Menghitung jumlah dokumen laporan hasil pelaksanaan konsultasi dan koordinasi terkait urusan tata usaha dan gaji setiap Tahun						
			(e) Pelaksanaan Rumah Tangga dan Perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Perlengkapan Badan PPSDM Kesehatan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Rumah Tangga Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/sarana dan prasarana dan layanan kesehatan klinik pratama Badan PPSDM Kesehatan						
			(f) Pelayanan Pengadaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pengadaan	Menghitung jumlah dokumen Laporan Hasil Pelayanan Pengadaan Badan PPSDM Kesehatan yang meliputi kegiatan pelaksanaan Pengadaan sekaligus pembinaan terkait pengadaan						
KEGIATAN : PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI						150.00	289.25	318.19	359.89	481.75	1,599.08

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	SASARAN	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
						2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi	1) Pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI	Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.						
			2) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah kegiatan pengabdian dilaksanakan oleh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes RI yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit	Menghitung jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan peserta didik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang ditujukan kepada masyarakat yang bersifat non profit						
			3) Pelaksanaan Penelitian bagi tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Jumlah penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di Poltekkes Kemenkes RI	Menghitung jumlah judul penelitian yang disusun oleh tenaga pendidik di 38 Politeknik Kesehatan dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional						

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bag PA
Sub Bag PA
Sub Bag PA
Sub Bag PA

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bag Datin
Sub Bag Datin
Sub Bag Datin
Sub Bag Datin
Sub Bag Datin
Sub Bagian Evapor
Sub Bagian Evapor
Sub Bagian Evapor

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bagian Evapor
Sub Bagian Evapor
Sub Bagian PP
Sub Bagian PP
Sub Bagian PP
Sub Bagian Ortala
Sub Bagian Ortala
Sub Bagian Ortala
Sub Bagian Ortala

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bagian Ortala
Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas
Sub Bag Perbendaharaan
Sub Bag Perbendaharaan
Sub Bag Perbendaharaan
Sub Bag Perbendaharaan
Sub Bag Perbendaharaan

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
Sub Bag Verifikasi dan Akuntansi
Sub Bag Pengelolaan BMN
Sub Bag Pengelolaan BMN
Sub Bag Pengelolaan BMN
Sub Bag Pengelolaan BMN
Sub Bag Pengelolaan BMN

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengembangan Pegawai
Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai

UNIT ORGANISASI PELAKSANA
(13)
Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Sub Bagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan
Sub Bag Umum dan Layanan Pengadaan

**UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA**

(13)

Politeknik Kesehatan

Politeknik Kesehatan

Politeknik Kesehatan

**MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	7.76	27.17	33.24	39.47	45.90	153.54
b.	Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	3.61	3.76	5.15	5.91	6.79	25.22
c.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	3.80	4.36	5.02	5.78	6.64	25.60
d.	Kepegawaian dan Umum	1148.73	1207.76	1233.20	1267.15	1280.32	6137.16
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	150.00	289.25	318.19	359.89	481.75	1599.08
JUMLAH		1313.90	1532.30	1594.80	1678.20	1821.40	7940.60

**MATRIKS ALOKASI ANGGARAN RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN PPSDM KESEHATAN
TAHUN 2015-2019**

NO	KEGIATAN PELAKSANAAN	ALOKASI (Rp Milyar)					TOTAL ALOKASI 2015-2019 (Rp Milyar)
		2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a.	Penyusunan Program dan Pengelolaan Informasi	7.57	10.81	23.55	25.91	28.50	96.33
b.	Pengembangan Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat	3.61	7.42	9.02	9.92	10.91	40.89
c.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6.34	7.75	8.93	9.82	10.81	43.65
d.	Kepegawaian dan Umum	312.44	333.22	170.32	187.35	206.09	1209.42
e.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	0.73	1.10	1.00	1.10	1.21	5.14
JUMLAH		330.69	360.30	212.82	234.10	257.51	1395.42

BAB V

PENUTUP

Pembangunan kesehatan akan dapat dicapai bila penyelenggaraan pembangunan kesehatan didukung oleh SDM Kesehatan dengan jumlah yang memadai, jenis yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi yang tinggi serta distribusi yang merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019 disusun sebagai acuan bagi semua bagian di Lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan semua pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan selanjutnya perlu diterapkan dalam perencanaan, penggerakan pelaksanaan dan evaluasi program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, sehingga hasilnya dapat diukur melalui indikator pencapaian output dan outcome yang nantinya sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Badan PPSDM Kesehatan untuk periode Tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada, Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan rencana aksi kegiatan ini.

Dengan disusunnya Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini, diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan program pembangunan kesehatan melalui penyediaan SDM Kesehatan serta pencapaian Visi Badan PPSDM Kesehatan sebagai penggerak terwujudnya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang profesional dalam mewujudkan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2007. *Undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Undang-undang No. 17 Tahun 2007 LN No. 33 Tahun 2007. TLN No. 4700.
- Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. 2013. *Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2010-2014*. Jakarta.
- Kementerian PPN. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta.
- Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. 2015. *Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- Kementerian Kesehatan. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 64 Tahun 2015.
- _____. 2015. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Revisi 1 Tahun 2017*. Jakarta.

PENGARAH

Kirana Pritasari

KONTRIBUTOR

Sjamsul Ariffin, Setyadi Nugroho, Agus Sri Sukoco, Ismawiningsih, Budiman,
Hery Hermawanto, Siti Hajar, Ita Dahlia, Erni Endah Sulistioratih, Frederika Lekatompessy,
Teguh Sarwono, Rini Murwarni, Erlina Yoselin Sena, M. Nazif, Dedi Supriadi,
Dian Muliawati, Abdurrahman, Rahmat Kurniadi dan seluruh staf teknis terkait di Lingkungan
Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan